

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR DI DESA PANTAI KECAMATAN KAPUAS BARAT

Leadership Of The Head Of The Village In The Development Of Infrastructure In The Beach Of Kapuas Barat Village

Fitriani^{1*}

Mita Sari²

Putri Irianti Sintaman³

^{1,2,3}Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

*email: fitrianimap86@gmail.com

Kata Kunci:

Kepemimpinan
Gaya kepemimpinan
Pengembangan Infrastruktur
Pedesaan.

Keywords:

Leadership
Leadership Style
Rural Infrastructure Development

Accepted

September 2019

Published

Desember 2019

Abstrak

Kepala desa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh penduduk desa dan diyakini dan juga diklaim memiliki kepemimpinan yang baik untuk pengembangan infrastruktur pedesaan serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kemajuan desa. Suatu organisasi akan berhasil atau gagal ditentukan oleh kepemimpinan. Studi ini mengangkat masalah: (1) Bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa pantai? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa pantai?

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (literatur). Sumber data primer adalah observasi langsung, wawancara dan pencatatan data di kantor desa tepi laut. Kemudian, dianalisis dengan teori-teori terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemimpinan kepala desa dalam mengembangkan bidang infrastruktur di desa Pantai, Kecamatan Kapuas barat, Kabupaten Kapuas. Hal ini diketahui dengan cara kepala kepala untuk

Abstract

The village chief as the leader who is directly elected by the villagers and it is believed and also claimed to have a good leadership for the development of rural infrastructure as well as to invite the community to participate in the advancement of the village. An organization will succeed or fail is determined by the leadership. This study raises the issue: (1) How is the leadership of village chief in the construction of infrastructure in the coastal village ? (2) What are the factors that affect the leadership of the village chief in the construction of infrastructure in the coastal village ?

The method used is qualitative research method with descriptive approach. The data used is primary data (observations and interviews) and secondary data (literature). The primary data sources are direct observation, interviews and recording the data in the seaside village office. Then, it is analyzed with related theories. The conclusion of this research was the leadership of the village chief in developing of infrastructure field in Pantai village, west Kapuas subdistrict, Kapuas district. It is known by the head chief's way to



© 2019 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/anterior.v1i2.456>.

PENDAHULUAN

Keberhasilan atau kegagalan Peningkatan Pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja Kepala desa, yang sejauh mana kepala desa dalam

merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dalam manajemen berarti menjalankan kepemimpinan fungsi

manajemen atau sebagai manajer dalam menjalankan fungsi manajemen. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat. Agar program pemerintah efektif maka perlu adanya Kepemimpinan kepala Desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah Tesis ini adalah : “Bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan bidang infrastruktur didesa Pantai dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan bidang infrastruktur didesa Pantai “

TUJUAN PENELITIAN

Mendeskripsikan dan menganalisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan bidang infrastruktur didesa pantai dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan bidang infrastruktur didesa pantai.

MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan suatu pembangunan didesa.

B. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan khususnya

kepada Camat selaku pemimpin di Kecamatan, Kepala desa selaku pemimpin di Desa, dan Masyarakat desa pantai.

LANDASAN TEORITIS

Konsep Kepemimpinan

Konsepsi pemimpin dan kepemimpinan selalu menarik perhatian untuk dibicarakan, hal ini dapat dimengerti karena pemimpin dan kepemimpinan sangat penting dibutuhkan oleh manusia. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan umat manusia di dunia ini ditentukan oleh beberapa orang saja yaitu mereka yang berperan sebagai pemimpin.

Fungsi Kepemimpinan

Tugas pokok kepemimpinan yang berupa mengantarkan, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbing dan sebagainya.

Kepemimpinan Kepala Desa

Tugas Kepala Desa

Tugas Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yang menyatakan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”

Pembangunan Infrastruktur Desa

Sondang P. Siagian, (1981:21) mendefinisikan pembangunan adalah: “Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,

Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.

METODE PENELITIAN

Terkait dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Bidang Infrastruktur di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas”, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur

Kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan desa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi seorang kepala desa juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desa semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar tercipta suasana yang kondusif dan harmonis sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan desa semakin baik akan bisa terwujud. Dalam hasil penelitian peneliti ada beberapa temuan penelitian, hal ini terlihat dari temuan-temuan penelitian antara lain :

Pada temuan pertama yaitu Kepala Desa bersama BPD sudah mensosialisasikan Program Desa melalui Musrenbang, yang diikuti oleh perwakilan dari masyarakat desa pantai, Ketua RT dan Perangkat Desa (Berita acara RKPDes terlampir).

Hal ini apabila dikaitkan dengan teori kepemimpinan Inovatif-Progresif yaitu kepemimpinan yang ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk

kepentingan masyarakat banyak dengan membuka ruang partisipasi masyarakat, transparan dan akuntabel (Buku Kepemimpinan Desa, Kementerian Desa PDTT), dengan indikator mengemudikan organisasi yang mana kepala desa mengatur arah tujuan organisasi agar tercapai suatu pembangunan desa serta mengacu kepada Pasal 54 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu antara lain; penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa. Selanjutnya, PERMEN Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tersebut juga menyaratkan penyelenggaraan Musyawarah Desa dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan dengan mendorong partisipatif atau melibatkan seluruh unsur masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan petani, nelayan, perempuan maupun masyarakat miskin. Setiap orang dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya, serta mendapatkan perlakuan yang sama. Penyelenggaraan Musdes dilakukan secara transparan, setiap informasi disampaikan secara terbuka dan hasilnya

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan ini bila dihubungkan dengan pendekatan Bottom-up (partisipatif) disini ialah perencanaan atau penyusunan rencana pembangunan desa dengan pendekatan dari bawah ke atas yang dibuat oleh pemerintah desa dan lembaga terkait desa BPD yang melibatkan semua komponen atau unsur masyarakat didesa yang bersangkutan. Sedangkan partisipasi masyarakat desa terhadap pelaksanaan rencana atau program pembangunan desa yang telah ditetapkan melalui pendekatan Bottom-up tersebut.

Pada temuan penelitian yang kedua yaitu bahwa didalam perkembangan desa pantai dilihat dari infrastruktur yang di skala prioritaskan yaitu jalan, jembatan dan tambatan perahu ada beberapa infrastruktur yang sudah dibuat dan diperbaiki, dan ada infrastruktur yang belum bisa dilaksanakan, hal ini memunculkan dugaan-dugaan dari masyarakat tentang kepemimpinan kepala desa yang kurang memperhatikan perkembangan dan kemajuan infrastruktur desa, yang mana didalam pembuatan program desa masyarakat tahu pembangunan infrastruktur apa saja yang benar-benar di prioritaskan saat diadakannya musrenbang masyarakat hanya menuntut program desa itu di laksanakan secepatnya, kurangnya kemampuan menyesuaikan diri kepala desa selaku pemimpin desa terutama didalam berkomunikasi langsung kepada masyarakat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin desa.

Hal ini apabila dikaitkan dengan teori komunikasi partisipatori yang dikemukakan Jacobson (dalam Rochajat Harun dan

Elvinaro Ardianto, 2012:261) dengan indikator komunikasi antara Kepala Desa dan masyarakat yang memandang partisipasi sebagai pusat pembangunan, meningkatkannya partisipasi orang-orang yang dibangun melalui komunikasi interpersonal dan kelompok, jalur komunikasi lokal atau media massa dipandang searti dengan pembangunan sosial dan individu maka komunikasi antara kepala desa dan masyarakat masih belum terjalin baik. Seorang komunikator dituntut untuk mampu menyampaikan pesan sesuai dengan keinginan komunikan, artinya bahwa dalam proses komunikasi dibutuhkan adanya sikap menghargai orang lain, serta ikut dalam suasana yang sedang dialami orang lain, sehingga dengan adanya sikap semacam itu proses komunikasi akan lebih mudah tercapai dan kepala desa selaku pemimpin tertinggi didesa harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan tersebut, untuk itu kepala desa harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu berkomunikasi dengan instansi desa yang berkait dan mensosialisasikan pada masyarakat yang ada didesa pantai melalui musyawarah.

Pada temuan penelitian ketiga yaitu bahwa kepemimpinan kepala desa pantai didalam memberikan motivasi kerja kepada perangkat desa berjalan sesuai dengan fungsi kepemimpinan dilihat dari (pelatihan-pelatihan untuk perangkat desa terlampir).

Hal ini apabila mengacu kepada teori motivasi prestasi dari Mc.Clelland dengan indikator memberi/membangun motivasi kerja, membimbing dan memberikan supervisi yang mana seseorang dianggap

mempunyai keinginan berprestasi lebih baik dari pada yang lain pada banyak situasi Mc. Clelland menguatkan pada tiga kebutuhan menurut Reksohadiprojo dan Handoko (1996 : 85) yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan afiliasi dan kebutuhan kekuasaan. Serta dikaitkan dengan dorongan/motivasi tersebut berupa pemberian tugas-tugas yang selalu dimonitor dan disupervisi, memberitahukan mana yang salah dan mana yang benar dalam supervisi, selalu mempertimbangkan kemampuan perangkat desa sebelum memberi tugas dan didalam memberi tugas pada perangkat desa selalu ada insentif apapun bentuknya, bila perangkat desa mendapat tugas ditempat lain akan mendapat uang transport dan kesejahteraan perangkat desa selalu menjadi perhatian kepala desa maka kepemimpinan kepala desa dalam memberikan motivasi kerja kepada bawahannya sesuai dengan fungsi kepemimpinan yang ada.

Faktor Yang Mempengaruhi Kepemimpinan Kepala Desa Faktor Kemampuan Personal

Pada temuan penelitian keempat yaitu kemampuan kepala desa dalam memimpin perangkat desa dan masyarakat belum sepenuhnya menunjukkan mampu memimpin, dikarenakan didalam lingkungan kantor desa kepala desa melaksanakan fungsi kepemimpinannya hanya dilingkungan masyarakat masih kurang teras kemampuan memimpinnnya dikarenakan kurang terjalinnnya komunikasi.

Hal ini apabila dikaitkan dengan teori kemampuan yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi (2003:52) dengan indikator

mengemudikan organisasi yang mana mengarahkan orang yang dipimpin untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi, bahwa kemampuan merupakan suatu kapasitas individu untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaan tertentu, seluruh kemampuan individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Maka kemampuan memimpin kepala desa dalam memimpin masyarakat masih belum teras di masyarakat.

Faktor Situasi dan Kondisi

Pada temuan penelitian kelima yaitu kepala desa menempatkan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi yang ada didesa. Hal ini bila dikaitkan dengan teori situasional yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1994:129) dengan indikator situasi dan kondisi bahwa seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang.

Temuan penelitian ini, baik dari hasil wawancara maupun pengamatan peneliti, menyimpulkan bahwa Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan bidang infrastruktur didesa pantai kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, dilihat dari bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan bidang infrastruktur belum sepenuhnya berjalan baik namun di dalam hal mensosialisasikan rencana dan pelaksanaan pembangunan, transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

dikatakan sudah baik, dan dikaitkan dengan teori-teori yang dipakai maka tipe kepemimpinan ini menandakan kepemimpinan yang inovatif-progresif yang mana membuka seluas-luasnya partisipasi dari masyarakat, transfaran dengan melibatkan masyarakat dalam membuat program desa, setiap informasi disampaikan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, serta didukung teori kepemimpinan dari Miftah Thoha, yaitu tipe Kontinum Demokratik yang mana mengajak bawahannya untuk berpartisipasi, menerima masukan dari bawah terkait rencana pembangunan desa. Dan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan bidang infrastruktur desa adalah faktor kemampuan personal yang dimiliki oleh kepala desa, kemampuan dalam memberikan pengarahan, bimbingan, supervisi serta motivasi kerja kepada perangkat desa namun kurangnya kemampuan kepala desa dalam berinteraksi dengan masyarakat membuat kemampuan kepala desa belum sepenuhnya mampu memimpin dan faktor situasi dan kondisi yang menempatkan gaya kepemimpinan seorang kepala desa dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada di desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Bidang Infrastruktur di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Bidang Infrastruktur di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas dilihat bagaimana kepala desa mensosialisasikan program desa, melibatkan masyarakat desa, perangkat desa, BPD, pendamping desa dan Ketua RT dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta mengawasi pembangunan desa, yang bersifat melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan, transfaran dan dapat dipertanggung jawabkan dalam hal-hal penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dengan indikator - indikator fungsi kepemimpinan, walaupun ada beberapa temuan yang menyatakan kurangnya komunikasi antara kepala desa dan masyarakat yang belum terjalin baik.
2. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa antara lain :
 - a. Faktor kemampuan personal yang dimiliki oleh kepala desa, kemampuan dalam memberikan pengarahan, bimbingan, supervisi serta motivasi kerja yang berjalan sesuai dengan fungsi kepemimpinan kepada perangkat desa namun kurangnya kemampuan komunikasi kepala desa dalam berinteraksi dengan masyarakat membuat kemampuan kepala desa belum sepenuhnya mampu memimpin masyarakat dalam hal penyampaian informasi langsung.
 - b. Faktor situasi dan kondisi bagaimana menempatkan gaya kepemimpinan seorang kepala desa dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada di desa,

dengan memperhatikan keadaan yang ada didesa sehingga kepala desa dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya.

Setelah menguraikan kesimpulan, penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan semoga dapat bermanfaat baik sekarang maupun di masa akan datang. Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

Saran Akademik

- I. Diperlukan penelitian lebih mendalam dan menyeluruh bagaimana Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan bidang infrastruktur didesa pantai kecamatan Kapuas barat Kabupaten Kapuas, sehingga dapat digambarkan yang jelas bagaimana tipe kepemimpinan kepala desa dalam membangun komunikasi dan dapat menarik partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan desa.

Saran Praktis

- I. Untuk Kepala Desa Pantai :
Dalam kepemimpinannya kepala desa dapat menempatkan gaya kepemimpinannya sesuai situasi dan kondisi desa dan terutama pemerintah desa harus memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya, juga harus mampu membuat keseimbangan antara program yang bersifat Top Down dan yang bersifat Bottom Up, serta semangat masyarakat desa secara partisipatif dalam pembangunan didaerahnya yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas. Kepala desa, harus membangun relasi

antar kekuatan politik didesa secara demokratis dalam merumuskan kepentingan desa. Dengan demikian kepentingan yang disalurkan pemerintah bukan lagi merupakan kepentingan dari kelompok tertentu saja, tetapi merupakan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan dan telah disepakati bersama. Dengan demikian masyarakat akan berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab terhadap setiap program dan proyek yang dilaksanakan didesa.

2. Untuk Masyarakat Desa :

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa yang mana masyarakat harus mendukung program-program desa yang sudah disepakati bersama dalam musyawarah rencana pembangunan.

REFERENSI

- Harun, Rochajad. Ardianto, Elvinaro, 2012. *Komunikasi Pembangunan Sosial dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kansil, C.S.T (1983). *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Bangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional
- Kartono, Kartini . 2003. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2015
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Penerjemah : Rohidi, R.T. Jakarta: UI-Press

- Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang : Universitas Negeri Malang. UM Press
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Peranada Media
- Siagian P. Sondang. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie Kencana Inu. 2003. *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. PT. Refika Susandi.
- Siagian, P.S (1991). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suswo Pangritno, N. Soehartono dan Supriyadi. (1987). *Pokok-Pokok Sosiologi Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudirwo, D. (1985). *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Aksara
- Thoha, Miftah (1995). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan dan pembangunan Nasional*